



FORMULIR PERNYATAAN DIRI (CRS)

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Jika memiliki pertanyaan terkait Domisili Wajib Pajak Anda, mohon hubungi konsultan pajak atau kantor pajak setempat.

Peraturan Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD") terkait Common Reporting Standard ("CRS") mewajibkan institusi keuangan untuk mengumpulkan, menyimpan dan melaporkan informasi Domisili Wajib Pajak dan informasi keuangan lainnya kepada Otoritas Perpajakan Indonesia.

Pemegang Rekening Keuangan adalah Pemegang Polis

Nomor Rekening Keuangan adalah No. SPAJ/Polis.

I. IDENTIFIKASI PEMEGANG REKENING KEUANGAN

1. Nama Pemegang Rekening Keuangan																								
2. Nomor Rekening Keuangan																								
3. Tempat Lahir (Untuk Pemegang Rekening Keuangan Individu)																								
	Tanggal Lahir <table><tr><td>d</td><td>d</td><td>m</td><td>m</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr></table> (Untuk Pemegang Rekening Keuangan Individu)												d	d	m	m	y	y	y	y				
d	d	m	m	y	y	y	y																	
4. Kewarganegaraan	☐ Indonesia ☐ Asing, negara asal <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							
5. Alamat Tinggal Saat ini/Tempat Usaha/Kantor/Sekolah																								
Perumahan/Kompleks/Apartemen/ Nama Tempat Usaha/Kantor/Sekolah																								
Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang																								
Kelurahan/Kecamatan											RT		RW											
Kota/Kabupaten																								
Provinsi											Kode Pos													
Negara																								

II. DEKLARASI DOMISILI WAJIB PAJAK

Apakah Pemegang Rekening Keuangan memiliki kartu identitas Wajib Pajak dari negara lain dan/atau memiliki Domisili Wajib Pajak di luar Indonesia? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini dengan menuliskan seluruh Negara/Yurisdiksi di mana Pemegang Rekening Keuangan memiliki Domisili Wajib Pajak.

No.	Tax Identification Number (TIN)/ Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Alasan jika TIN tidak tersedia ¹⁾	Jika alasan TIN tidak tersedia adalah B, mohon jelaskan
1.			☐ A ☐ B ☐ C	
2.			☐ A ☐ B ☐ C	
3.			☐ A ☐ B ☐ C	

III. KLASIFIKASI PERUSAHAAN/BADAN (Pertanyaan tambahan jika Pemegang Rekening Keuangan adalah Perusahaan/Badan)

☐	a) Institusi Keuangan - selain Badan Investasi.		
☐	b) Perusahaan/badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan sebutkan nama bursa efek di mana saham tersebut diperdagangkan: <table><tr><td></td></tr></table>		
☐	c) Perusahaan/badan yang terafiliasi dengan perusahaan/badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan sebutkan nama perusahaan/badan terafiliasi yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek: <table><tr><td></td></tr></table> Sebutkan nama bursa efek di mana saham tersebut diperdagangkan: <table><tr><td></td></tr></table>		
☐	d) Badan Pemerintah, Bank Sentral atau Organisasi Internasional.		
☐	e) Badan Non-Keuangan Pasif (Perusahaan yang lebih dari 50% sumber pendapatannya hanya berasal dari investasi/merupakan perusahaan investasi). Wajib melengkapi bagian IV. IDENTIFIKASI PIHAK PENGENDALI.		
☐	f) Perusahaan/Badan lainnya, jelaskan <table><tr><td></td></tr></table>		

Catatan: ¹⁾ A: Negara/yurisdiksi tempat Pemegang Rekening Keuangan tinggal tidak menerbitkan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) kepada penduduknya.

B: Pemegang Rekening Keuangan tidak dapat memperoleh TIN atau nomor identifikasi yang setara.

C: TIN tidak diwajibkan (alasan ini hanya dapat dipilih apabila peraturan perundang-undangan domestik di yurisdiksi terkait tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut).

IV. IDENTIFIKASI PIHAK PENGENDALI *(Pertanyaan tambahan jika Pemegang Rekening Keuangan adalah Perusahaan/Badan Non-Keuangan Pasif)*

A. Pihak Pengendali 1

1. Nama Pihak Pengendali

2. Tipe Pihak Pengendali¹⁾

- ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui kepemilikan
☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui cara lain
☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Eksekutif Senior
☐ Lainnya

3. Tempat Lahir

Tanggal Lahir

4. Kewarganegaraan

- ☐ Indonesia ☐ Asing, negara asal

5. Alamat Tinggal Saat ini

Perumahan/Kompleks/Apartemen

Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang

Kelurahan/Kecamatan

RT

RW

Kota/Kabupaten

Provinsi

Kode Pos

Negara

6. Deklarasi Domisili Wajib Pajak

Apakah Pihak Pengendali memiliki kartu identitas Wajib Pajak dari negara lain dan/atau memiliki Domisili Wajib Pajak di luar Indonesia? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini dengan menuliskan seluruh Negara/Yurisdiksi di mana Pihak Pengendali memiliki Domisili Wajib Pajak.

No.	Tax Identification Number (TIN)/ Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Alasan jika TIN tidak tersedia ¹⁾	Jika alasan TIN tidak tersedia adalah B, mohon jelaskan
1.			☐ A ☐ B ☐ C	
2.			☐ A ☐ B ☐ C	
3.			☐ A ☐ B ☐ C	

B. Pihak Pengendali 2

1. Nama Pihak Pengendali

2. Tipe Pihak Pengendali¹⁾

- ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui kepemilikan
☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui cara lain
☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Eksekutif Senior
☐ Lainnya

3. Tempat Lahir

Tanggal Lahir

4. Kewarganegaraan

- ☐ Indonesia ☐ Asing, negara asal

5. Alamat Tinggal Saat ini

Perumahan/Kompleks/Apartemen

Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang

Kelurahan/Kecamatan

RT

RW

Kota/Kabupaten

Provinsi

Kode Pos

Negara

6. Deklarasi Domisili Wajib Pajak

Apakah Pihak Pengendali memiliki kartu identitas Wajib Pajak dari negara lain dan/atau memiliki Domisili Wajib Pajak di luar Indonesia? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini dengan menuliskan seluruh Negara/Yurisdiksi di mana Pihak Pengendali memiliki Domisili Wajib Pajak.

No.	Tax Identification Number (TIN)/ Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Alasan jika TIN tidak tersedia ¹⁾	Jika alasan TIN tidak tersedia adalah B, mohon jelaskan
1.			☐ A ☐ B ☐ C	
2.			☐ A ☐ B ☐ C	
3.			☐ A ☐ B ☐ C	

Catatan: ¹⁾ A: Pengendalian melalui kepemilikan : Orang pribadi yang memiliki lebih dari 25% saham atas suatu badan.

B: Pengendalian melalui cara lain : Orang pribadi yang menguasai badan melalui voting rights/ agreement.

¹⁾ A: Negara/yurisdiksi tempat Pemegang Rekening Keuangan tinggal tidak menerbitkan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) kepada penduduknya.

B: Pemegang Rekening Keuangan tidak dapat memperoleh TIN atau nomor identifikasi yang setara.

C: TIN tidak diwajibkan (alasan ini hanya dapat dipilih apabila peraturan perundang-undangan domestik di yurisdiksi terkait tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut).

1. Semua fakta material, yaitu data, informasi, jawaban, keterangan, kondisi, pernyataan dan fakta ("**Informasi Konsumen**") yang Saya/Kami berikan dalam Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini, serta setiap formulir dan dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT Tokio Marine Life Indonesia ("**Tokio Marine Life**") ("**Dokumen Polis**") sebagai bagian dari pengajuan pertanggungan asuransi atau transaksi Polis adalah lengkap, benar, akurat, terkini, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan konsisten antara satu dengan lainnya, dan tidak ada Informasi Konsumen yang Saya/Kami sembunyikan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.
2. Saya/Kami memahami dan setuju bahwa Tokio Marine Life dapat menolak pengajuan pertanggungan asuransi atau mengakhiri Polis jika Saya/Kami tidak memberikan informasi yang diperlukan dan/atau menyanggah pernyataan maupun menarik persetujuan yang diberikan di atas;
3. Saya/Kami merupakan Pemegang Rekening Keuangan/orang yang diberikan kuasa oleh Pemegang Rekening Keuangan sehingga berwenang menandatangani dan/atau menyetujui Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini atau dokumen lain yang terkait.
4. Saya/Kami memahami dan setuju bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan/atau penggunaan data pribadi Saya/Kami yang diperoleh/tersedia/disimpan oleh Tokio Marine Life (sesuai yang tercantum pada Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini atau sarana lain) dalam rangka pemrosesan Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini, pelayanan nasabah, proses dan pembayaran klaim asuransi serta menerima informasi produk lainnya. Dalam hal Pemegang Polis tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi produk dari Tokio Marine Life (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tokio Marine Life dan/atau afiliasinya), Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Service Tokio Marine Life.
5. Saya/Kami memahami bahwa sebagai subjek data memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, membatasi, memindahkan, dan menolak pemrosesan data pribadi Saya/Kami yang dikendalikan oleh Tokio Marine Life atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan asuransi Saya/Kami. Informasi lebih lanjut mengenai pelindungan data pribadi dan hak-hak Saya/Kami dapat diakses melalui tautan berikut: www.tokiomarine.com/id/id/life/privacy-policy.
6. Saya/Kami setuju memberikan salinan dokumen *hardcopy* dengan tanda tangan basah pada Formulir Pernyataan Diri (CRS) yang sebelumnya telah diserahkan kepada Tokio Marine Life secara elektronik jika di kemudian diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Lembaga Keuangan Pelapor CRS.
7. Saya/Kami mengetahui bahwa Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini akan tetap berlaku kecuali apabila terdapat perubahan terkait status perpajakan atau penambahan informasi yang telah diberikan sebelumnya. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi tersebut, Saya/Kami akan memberitahukan kepada Tokio Marine Life dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif perubahan tersebut.

(Untuk Pemegang Rekening Keuangan Perusahaan/Badan, mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan)

TTD	
Nama: _____	
Tempat : _____	
Tanggal : __/__/____	